



## Analisis Upaya Pengendalian Inflasi Era Covid-19 di Indonesia

Rahmat Putra Ahmad Hasibuan

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [rahmatputrahasibuan@gmail.com](mailto:rahmatputrahasibuan@gmail.com)

### ABSTRACT

Analysis of Inflation Control Efforts in the Covid-19 Era in Indonesia. Indonesia as one of the countries affected by Covid is experiencing economic problems, namely high inflation rates and declining currency rates. This study aims to analyze efforts to control inflation both in terms of fiscal and monetary policies. This study uses descriptive qualitative methods sourced from secondary data from literature studies and scientific articles. The results of this study indicate that fiscal and monetary policies can control inflation by improving the real sector of the economy.

### Keywords

*Inflation Control, Fiscal Policies, Monetary Policies*



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Saat ini dunia global sedang mengalami penyebaran virus Covid-19 yang tidak terkontrol. Pandemi COVID-19 memicu terjadinya krisis multidimensi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Masalah ini berdampak ke berbagai sektor, mulai sektor kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hingga ketahanan pangan (Food and Agriculture Organization, 2020). Indonesia juga terkena dampak bencana kesehatan hingga terkonfirmasi mencapai lebih 3500.0000 terkonfirmasi positif covid dan 139.500 tingkat kematian pada tahun 2021. Selain dampak Kesehatan, Indonesia juga berjuang mengendalikan kondisi perekonomian yang tidak stabil hingga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus tahun 2020 dan ketidakstabilan harga serta inflasi.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi makro Indonesia salah satunya yaitu terjadi inflasi. Di Indonesia terjadi fluktuasi tingkat inflasi selama COVID-19 hingga pada Februari-Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 2,98% - 2,96% year on year (yoy), dengan naiknya harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan yang cukup drastis (A. Ika Fahrika, 2020).

**Tabel 1**  
**Data Inflasi Indonesia 2020**

DATA INFLASI 2020	
Januari 2020	2.68 %
Februari 2020	2.98 %
Maret 2020	2.96 %
April 2020	2.67 %
Mei 2020	2.19 %
Juni 2020	1.96 %
Juli 2020	1.54 %
Agustus 2020	1.32 %
September 2020	1.42 %
Oktober 2020	1.44 %
November 2020	1.59 %
Desember 2020	1.68 %

*Sumber : Bank Indonesia 2020*

Inflasi menjadi salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara, karena perubahan dan fluktuasi harga berdampak langsung terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menganalisis perekonomian suatu negara, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap variabel makroekonomi agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan.

Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2014:161). Venieris dan Sebold mendefinisikan Inflasi "a sustained tendency for general price", yaitu kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, menurut definisi ini, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Di dalam pengertian tersebut tercakup tiga aspek, yaitu: 1) Tendency atau kecenderungan harga-harga untuk meningkat, 2) Sustained. Peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja melainkan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, dan 3) General level of prices. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya satu macam barang saja (Sutawijaya, 2012).

Pengendalian tingkat inflasi atau menjaga kestabilan harga merupakan salah satu masalah utama makroekonomi, disamping beberapa masalah makroekonomi penting lainnya seperti mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pendistribusian pendapatan yang adil dan merata. Sebagai indikator perekonomian yang sangat penting, fenomena inflasi telah banyak mendapat perhatian para ahli ekonomi. Setiap kali ada gejolak sosial, politik dan ekonomi di dalam maupun di luar negeri, masyarakat selalu mengaitkan dengan masalah inflasi. Stabilitas ekonomi suatu negara di antaranya tercermin dari adanya stabilitas harga, dalam arti tidak terdapat gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen yang akan merusak sendi-sendi perekonomian. Pengendalian inflasi sangat penting menjadi salah satu perhatian pemerintah karena beberapa alasan Pertama, inflasi memperburuk distribusi pendapatan (menjadi tidak seimbang). Kedua, inflasi menyebabkan berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang. Ketiga, inflasi mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri. Keempat, inflasi dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.

Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang terkendali akan menambah keuntungan pengusaha, pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa datang dan pada akhirnya akan mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik. Dampak negatif pada perekonomian diantaranya mengurangi kegairahan penanam modal, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperburuk distribusi pendapatan dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu perlu diupayakan jangan sampai penyakit ekonomi itu menjadi penghambat jalannya roda pembangunan.

Menurut Lerner, inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Sedangkan menurut Sukirno (2010), inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. Sementara itu Mankiw (2000) menyatakan bahwa inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Hampir semua negara, menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil adalah tugas bank sentral. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perluasan lapangan kerja, dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah teori telah dikembangkan untuk menjelaskan gejala inflasi. Menurut pandangan

moneteris penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan yang diminta oleh masyarakat. Sedangkan golongan non moneteris, yaitu keynesian, tidak menyangkal pendapat pandangan moneteris tetapi menambahkan bahwa tanpa ekspansi uang beredar, kelebihan permintaan agregat dapat saja terjadi jika terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor netto. Dengan demikian inflasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor moneter dan non moneter. Selanjutnya pandangan tentang inflasi disempurnakan dengan munculnya teori ekspektasi, yang mengungkapkan bahwa para pelaku ekonomi membentuk ekspektasi laju inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional.

Berdasarkan beberapa teori dasar tentang inflasi tersebut berbagai penelitian mengenai inflasi telah dilakukan di banyak negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Jika diklasifikasikan secara umum maka inflasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat berasal sisi permintaan (*demand-side inflation*), inflasi yang berasal dari sisi penawaran (*supply-side inflation*) atau kombinasi dari keduanya (*demand-supply inflation*). Dari sisi penawaran penyebab inflasi misalnya adalah karena kenaikan upah (*wage cost push inflation*) dan kenaikan harga barang-barang impor (*import cost inflation*). Sementara itu, dari sisi permintaan disebabkan oleh kenaikan permintaan yang tidak diimbangi oleh penawaran (*demand pull inflation*).

Inflasi yang terkendali akan menciptakan kestabilan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, walaupun kadang-kadang terjadi *trade off* antara pengendalian inflasi dengan beberapa variabel ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Di sisi lain, dinamisnya perkembangan ekonomi yang terjadi, serta belum konsistennya hasil penelitian mengenai perilaku inflasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, menunjukkan bahwa penelitian mengenai variabel yang mempengaruhi inflasi ini tetap penting untuk dilakukan di Indonesia. Penelitian ini akan difokuskan pada inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang menggeser permintaan agregat sehingga tercipta kelebihan permintaan (*excess demand*), yang merupakan *inflationary gap* dan dapat menekan harga untuk naik. Peningkatan permintaan agregat pada situasi produksi telah mencapai kapasitas penuh (*full employment*) dan akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan pada pasar barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa akan meningkat. Dari uraian di atas dapat diambil pokok permasalahannya yaitu: faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi inflasi di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Library research yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan dengan menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah berkomitmen buat menggapai target inflasi yang sudah diresmikan lewat koordinasi kebijakan yang searah dengan target itu. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Bank Indonesia sudah memutuskan tujuan inflasi. Sedangkan setelah UU tersebut, pemerintah menetapkan sasaran inflasi dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia merupakan buat mengatur titik berat harga bagian permohonan hasil akumulasi (manajemen permohonan). Dalam suasana ini, kebijakan moneter tidak dimaksudkan buat bereaksi kepada kenaikan inflasi yang diakibatkan oleh insiden gejolak sedangkan yang hendak lenyap dengan sendirinya. Inflasi tidak dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga satu atau dua item kecuali jika menyebar (atau mengakibatkan kenaikan harga) ke item lain. Indeks Harga Konsumen sering digunakan untuk menentukan tingkat inflasi (CPI). Pada rapat koordinasi Tim pengawasan Inflasi Esensial (TPIP) 11 Februari 2021, Penguasa serta Bank Indonesia meluluskan 5 inisiatif penting buat mendesak pengaturan inflasi. Di antara langkah- langkah penting yang ditargetkan untuk melindungi inflasi dalam kisaran target 3, 0 persen sampai 1% pada tahun 2021 merupakan selaku selanjutnya:

1. Menjaga inflasi volatile food pada kisaran 3,0% sampai 5%. Upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan empat pilar utama di masa depan: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Cadangan, Penyaluran Mudah, serta Komunikasi Efisien (4K). Pandemi Covid- 19, tercantum membenarkan ketersediaan cadangan serta kelancaran penyaluran saat sebelum Hari

Raya Keimanan Nasional (HBKN). Pelaksanaan strategi tersebut dipusatkan pada memastikan pasokan yang berkelanjutan dan distribusi yang lancar di seluruh wilayah antara lain lewat pemakaian teknologi data serta kenaikan kerja sama regional;

2. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat serta Wilayah dalam penyelesaian inflasi dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2021 berjudul "Mendesak Berkembang Kedudukan UMKM Pangan lewat Optimalisasi Digitalisasi buat Mensupport Penyembuhan Ekonomi serta Kemantapa Harga Pangan.
3. Membangun kelangsungan jalur Kementerian atau Badan dengan dukungan Penguasa Daerah dalam bagan menyukseskan program kegiatan TPIP tahun 2021;
4. Pendistribusian yang efisien dengan meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi, termasuk melalui program food estate, serta optimalisasi infrastruktur dan kesiapsiagaan menghadapi dampak bencana alam; dan
5. Melindungi ketersediaan Persediaan Beras Pemerintah (CBP) selaku bagian dari program Ketersediaan Bekal serta Pemantapan Harga( KPSH) buat menolong penguatan Pemisahan Aktivitas Warga (PPKM).

Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi program yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada 2020 inflasi IHK tercatat rendah sebesar 1,68% (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19 di tengah pasokan yang memadai. Pertemuan tersebut juga menyepakati sasaran inflasi 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.

Sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 disepakati masing-masing sebesar  $3,0\% \pm 1\%$ ,  $3,0\% \pm 1\%$ , dan  $2,5\% \pm 1\%$  yang akan ditetapkan kemudian melalui PMK. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan dapat makin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian serta

pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis kualitatif deskriptif menunjukkan upaya pengendalian inflasi era covid-19 dilakukan dengan lima Langkah strategis yaitu dengan menjaga inflasi volatile food, koordinasi Pemerintah Pusat serta Wilayah, menyukseskan program kegiatan TPIP, peningkatan produksi ketahanan pangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Ika Fahrika. (2020) Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. INOVASI: Jurnal Feb Unmul.
- Amir, Amir. (2007) Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. Jurnal Inflasi dan Pengangguran Vol. 1 No.1. Jambi.
- Bank Indonesia (2020) Data Inflasi Indonesia Januari – Desember. Indonesia
- Boediono. (1998) Ekonomi Moneter. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Chapra, M. U. (1985). Towards a Just Monetary System (edisi 8). the islamic fondation 223 london road Leicester, UK.
- Gregory, Mankiw N., 2000, Teori Ekonomi Makro (Terjemahan), Edisi Keempat, Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. (2010) Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 8(2), 85-101.